

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Permasalahan pengungsi merupakan salah satu isu yang menjadi tanggungjawab komunitas internasional seperti negara sebagai salah satu institusi yang memiliki prosedur penanganan pengungsi terutama yang telah meratifikasi Refugee Convention 1951. Korea Selatan telah meratifikasi rezim pengungsi ini pada tahun 1992 dan mengimplementasikan ke dalam peraturan domestik pada tahun 2013. Meskipun telah meratifikasi dan mengimplementasikannya tingkat penerimaan pengungsi di Korea Selatan sangatlah rendah. Pada tahun 2020 tingkat penerimaan pengungsi hanya mencapai 1,9% dari jumlah permohonan suaka yang masuk. Korea Selatan tampak menerapkan kebijakan yang tertutup atas pengungsi terlihat dari salah satu kebijakan pemulangan pengungsi secara langsung yang tidak sejalan dengan ketentuan dari Refugee Convention 1951. Hal ini terlihat dari penolakan pengungsi Yaman pada tahun 2018 dimana lebih 500 orang ditolak oleh pemerintah. Namun pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih ramah atas pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Pemerintah turut mengeluarkan visa jangka panjang bagi pengungsi Afghanistan agar dapat menetap dan mencari pekerjaan. Terlihat perubahan kebijakan Korea Selatan yang selama ini tertutup atas pengungsi menjadi lebih ramah pada tahun 2021 atas pengungsi Afghanistan.

Berdasarkan *domestic structural parameter* terdapat faktor yang memengaruhi berasal dari pengaruh partai progresif dalam eksekutif dan legislatif yang mendukung bentuk demokrasi secara langsung terutama penerimaan atas

pengungsi. Pada masa pemerintahan Moon Jae In di tahun 2021, partai progresif memiliki kekuasaan dan mayoritas menduduki kursi Majelis Nasional Korea Selatan mencapai 56% sehingga keputusan atas penerimaan pengungsi ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan legislatif yang dipegang oleh partai progresif. Selain itu adanya dorongan dari gabungan kelompok advokasi HAM yang tergabung di dalam *Refugee Human Rights Network* dengan merangkul lebih dari 100 organisasi lainnya. Selanjutnya kelompok Kristen konservatif di Korea Selatan turut memberikan desakan kepada pemerintah yang mampu memobilisasi suara masyarakat menjadi positif atas pengungsi Afghanistan. Terlihat dari jajak pendapat yang dilakukan pada 27 Agustus 2021 menunjukkan angka 68,7% atas mereka yang menerima pengungsi Afghanistan. Sehingga dapat disimpulkan faktor yang paling memengaruhi perubahan kebijakan ini di dalam struktur domestik ialah adanya jejaring advokasi lebih dari 100 kelompok advokasi yang kemudian didukung oleh adanya kekuasaan di lembaga legislatif.

Sedangkan berdasarkan *international structural parameter* terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi. Pertama yaitu dorongan AS terhadap Korea Selatan dalam menerima pengungsi Afghanistan. AS merupakan dua mitra yang telah menjalin hubungan semenjak 1953 dan semakin intens hingga sekarang. Korea Selatan turut terikat ke dalam *US-ROK Mutual Defense Treaty 1953* yang turut mengindikasikan negara mitra akan turut mengambil tindakan untuk mengatasi bahaya dan ancaman bersama. Selain itu terdapat peran dari UNHCR dalam mendorong Korea Selatan untuk memberikan perlindungan internasional atas pengungsi Afghanistan. Korea Selatan merupakan salah satu pihak dari UNHCR dan juga telah meratifikasi

Refugee Convention 1951 terdorong dengan himbauan dari UNHCR ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan melalui penerimaan pengungsi Afghanistan berdasarkan international parameter ini ialah adanya dorongan dan peran dari AS sebagai sekutu tradisional Korea Selatan semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Namun untuk faktor *domestic-international conjunctural parameter* dalam perubahan kebijakan pengungsi Korea Selatan, peneliti tidak menemukan faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan ini. Baik itu faktor konjungtural yang memengaruhi di dalam ranah domestik ataupun di dalam ranah internasional. Hal ini disebabkan peneliti tidak menemukan situasi relevan yang berhubungan dan memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerimaan pengungsi Afghanistan tahun 2021, peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam hasil penelitian ini. Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sesuatu yang bersifat dinamis sehingga mengalami perubahan sepanjang waktu baik itu masa kepemimpinan ataupun terjadinya permasalahan yang mengharuskan perumusan kebijakan baru yang berbeda. Sehingga peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan mengaplikasikan konsep dan teori yang lebih luas lagi. Hal ini ditujukan agar mendapatkan berbagai faktor yang lebih dalam untuk memengaruhi perubahan kebijakan ini berdasarkan teori dan konsep yang berbeda.